

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Adapun pengertian sistem akuntansi keuangan daerah yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Erlina (2015:5) Mengatakan bahwa:

“Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum”.

Sedangkan menurut Nurmalia Hasanah (2016:195) mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan sistem akuntansi baik secara manual maupun komputerisasi, yang mencatat transaksi keuangan daerah sebagai akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran lain terkait dengan keuangan daerah”.

Sedangkan Menurut Abdul Halim (2014: 94) mengatakan bahwa:

“Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan

yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

### **2.1.1.2 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Adapun tujuan dari akuntansi pemerintahan menurut Nurlan Darise (2008:28) mengatakan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan adalah:

1. **Pertanggungjawaban**  
Memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.
2. **Manajerial**  
Akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.
3. **Pengawasan**  
Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

### **2.1.1.3 Sistem Pencatatan**

Menurut Erlina Rasdianto (2015:4) mengatakan

“proses pencatatan yang merupakan salah satu proses akuntansi, akuntansi menggunakan sistem pencatatan”.

Sedangkan menurut Erlina Rasdianto (2013:4) ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu:

1. **Single entry**  
Sistem pencatatan single entry disebut dengan sistem tata buku tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat disisi

penerimaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat kurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum. Single entry ini disebut dengan pembukuan, sedangkan dalam akuntansi sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem double entry atau triple entry.

2. Double Entry

Sistem pencatatan double entry disebut sistem tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap Pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem double entry sering disebut dengan istilah menjurnal. Pada masa sebelum reformasi, sistem pencatatan yang dilakukan oleh akuntansi keuangan daerah adalah sistem tata buku tunggal (single entry). Tetapi setelah reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105/2000, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem pencatatan double entry.

3. Triple Entry

Sistem pencatatan triple entry merupakan sistem pencatatan yang menggunakan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada double entry. Dengan adanya pencatatan ini maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapatan belanja daerah. Pencatatan dengan sistem triple entry ini dilaksanakan saat pencatatan double entry dilaksanakan, maka sub bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*) artinya bahwa setiap transaksi yang terjadi akan dicatat pada akun yang tepat karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media *cross check*. Selain ketepatan dalam pencatatan transaksi, (*double entry*) juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal yang akurat, karena jumlah sisi debit harus sama dengan sisi kredit.

#### **2.1.1.4 Metode Basis Pencatatan Akuntansi**

Dalam proses pencatatan dibutuhkan basis akuntansi dalam menentukan kapan transaksi atau kejadian harus diakui. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual.

Menurut Nurlan Darise (2008:38) mengatakan bahwa:

“Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan”.

Adapun basis akuntansi pemerintahan Menurut Erlina Rasdianto (2015:11) terdiri dari tiga basis yaitu:

1. Akuntansi Berbasis Kas
2. Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual
3. Akuntansi Berbasis Akrual

Berikut penjelasan tentang basis akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Akuntansi berbasis kas  
Akuntansi berbasis kas merupakan akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aset dan kewajiban.
- 2) Akuntansi berbasis kas menuju akrual  
Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual (PP No. 24 Tahun 2005).
- 3) Akuntansi berbasis akrual  
Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi akrual informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual, sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa saat ini penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **2.1.1.5 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Abdul Halim (2007:52) prosedur sistem akuntansi keuangan daerah adalah:

1. Pencatatan
2. Pengikhtisaran
3. Pelaporan

Adapun penjelasan menurut sebagai berikut:

1. Pencatatan
  - a. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
  - b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
  - c. Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
2. Pengikhtisaran
  - a. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
  - b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date.
  - c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.

- d. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
  - e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
  - f. Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.
3. Pelaporan  
Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

## **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintah di luar urusan pemerintah pusat sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang. Dengan kewenangan tersebut maka daerah juga berkewenangan membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka pendapatan asli daerah juga harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah bahkan diharapkan tiap tahunnya pendapatan asli daerah akan selalu meningkat. Selain itu juga setiap daerah diberi keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai wujud dari asas desentralisasi.

Menurut Iryanie (2018:10) mengatakan bahwa:

“Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan dari sumber pendapatan/penerimaan”.

Menurut Djaenuri (2012:88)

“Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan menurut Soleh dan Rochmansjah (2010:63) mengatakan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah sebagai penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah”.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan penting bagi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan tiang utama yang menjadi penyangga kehidupan daerah. Tanpa adanya dana yang mencukupi untuk membiayai kebutuhan daerah, maka ciri pokok dari pelaksanaan otonomi daerah akan menghilang.

#### **2.1.2.2 Macam-macam Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Iryanie (2018:10) tentang Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain
4. Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Maka dari kutipan diatas diuraikan bahwa:

1. Hasil pajak daerah  
Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan melalui peraturan daerah.

Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dll.

2. Hasil retribusi daerah  
Pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan / kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair dll.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  
Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah  
Penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dll.

Dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerahnya.

### **2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan yang berkualitas merupakan laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan. Kualitas laporan keuangan daerah yang



disajikan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menampilkan suatu kualitas yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan.

Menurut Iman Mulyana (2010:96) dalam Susilawati (2014) mengemukakan bahwa:

“Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”.

Pengertian laporan keuangan pemerintah daerah yang dikemukakan oleh

Dadang Suwanda dan Hendri Santosa (2015:26) sebagai berikut:

“Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah”.

Menurut Fitra (2019:9) kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi sehingga harus memiliki karakteristik kualitas yang baik”.

Menurut Mursyidi (2013:47)

“kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir yang memiliki karakteristik yang baik. karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”.

Sedangkan menurut Erlina, dkk (2015:19) mengatakan bahwa:

“Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah proses akuntansi yang terstruktur dalam suatu periode akuntansi dan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang memerlukannya.

### **2.1.3.2 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Menurut Fitra (2019:9) karakteristik kualitas laporan keuangan adalah:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

Adapun penjelasan dari karakteristik laporan keuangan daerah sebagai berikut:

#### 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)  
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)  
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu  
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap  
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

### a. Penyajian jujur.

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

### b. Dapat diverifikasi (verifiability)

Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

### c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

## 3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

## 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Pramono Hariadi (2013:131) mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

“Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, diperlukan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang memadai”.

Menurut Mardiasmo (2018:204)

“untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang andal. Karena sistem akuntansi yang lemah dapat menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang andal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan”.

Menurut Mahmudi (2010:27) mengemukakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

“Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas”.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cholifah, D. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Batu mengatakan bahwa:

“Model regresi diperoleh nilai signifikan variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar  $0,000 < 0,05$ . Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  yang menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,165 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,682. Hasil tersebut terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $6,165 > 1,682$ . Sehingga dapat disimpulkan SAKD berpengaruh secara signifikan positif terhadap KKKD”.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Adhitama, S. (2017). Dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 5(2).

“Nilai  $t$  tabel pada  $\alpha$  (0,05) adalah 1,662. Pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah nilai  $t$  hitung adalah 2,573 dan nilai sig adalah 0,012. Hal ini dapat dilihat bahwa  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $2,573 > 1,662$  atau nilai signifikansi  $0,012 < 0,05$  hal ini membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah”.

Penelitian yang dilakukan oleh Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan. (2012) ISSN: 1411-514X dengan Judul Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan hasil penelitiannya menyatakan bahwa:

“Model regresi variabel SAKD signifikan hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk SAKD sebesar 0,039 ( $\alpha < 0.05$ ), sehingga dapat disimpulkan variabel SAKD mempunyai pengaruh signifikan terhadap KLKD”.

Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Desiana Wati, dkk (2014) (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) dengan judul Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

“Berdasarkan analisis statistik pada tabel 1 dalam penelitian diperoleh nilai koefisien regresi sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,135. Hal ini berarti sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas

laporan keuangan daerah. Sedangkan nilai signifikansi sistem akuntansi keuangan daerah adalah  $0,021 < 0,05$ . Hal ini berarti sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah”.

Berdasarkan teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **2.2.2 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

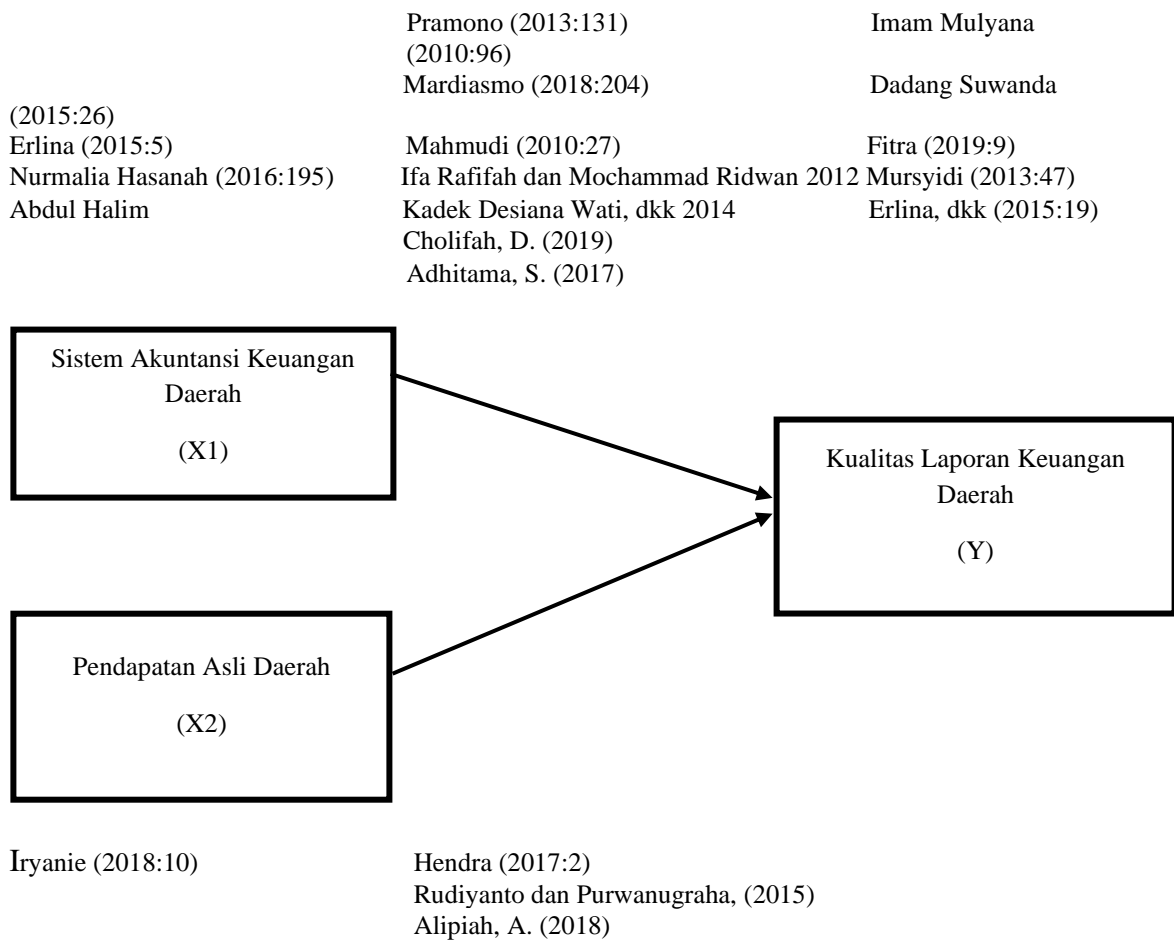
Menurut Hendra (2017:2) mengatakan bahwa:

“kewenangan pemerintah adalah mengelola APBD secara baik dan menyalurkan untuk membangun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Adapun indikator penting untuk bisa menilai keberhasilan otonomi daerah di masa yang akan datang yaitu daerah otonomi harus mampu mengelola potensi sumber daya alam dan pengelolaan keuangan daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga kualitas laporan keuangan yang diperoleh semakin baik”.

Hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rudiyanto dan Purwanugraha, (2015) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Sedangkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alipiah, A. (2018). Dengan judul Analisis pengaruh realisasi pendapatan asli daerah dan realisasi anggaran belanja terhadap kualitas laporan keuangan. Mengatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. pendapatan asli daerah yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:99) mengatakan sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Sedangkan menurut Moh. Nazir (2014:132) mengatakan bahwa:

“Hipotesis merupakan pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan menjadi dasar kerja serta panduan dalam verifikasi”.

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

H2: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.